

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Drajat Armono^{1*}, Niardi Ikhsan Wicaksono², Annisa Fitriani³, Nurhayanto^{4*}

^{1,3} Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

^{4*} Universitas Amikom, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding email: nurhayanto@amikom.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 120 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulungan yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kualitas laporan keuangan, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia

Abstract

This research was conducted to determine the impact of the implementation of the Regional Financial Accounting System and Human Resource Competence on the quality of local government financial reports. Data collection for this study utilized a questionnaire survey, which was distributed to 120 employees of the Regional Work Units (SKPD) in Bulungan Regency who work in accounting/finance departments. The data collected was processed using SPSS version 26.0. The statistical method used to test the hypotheses was multiple linear regression analysis. The hypothesis testing results indicate that (1) the implementation of the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports, and (2) Human Resource Competence has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: Financial report quality, implementation of Regional Financial Accounting System, and Human Resources

I. PENDAHULUAN

Suatu negara memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai organisasi kesatuan, termasuk dalam sektor publik yang bertujuan menyediakan barang-barang publik. Organisasi ini, yang bisa dimiliki oleh pemerintah atau lembaga sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, bertanggung jawab menyediakan layanan publik untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, patuh hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Langkah konkret dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan ini harus mematuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan. Setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tersebut disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum.

Laporan keuangan pemerintah daerah mencakup berbagai elemen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja finansial untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber dana.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menilai sejauh mana pengelolaan keuangan efektif. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan kontribusi positif dalam pembuatan kebijakan pemerintahan di masa depan, memandu pengambilan keputusan, dan mendorong percepatan pembangunan serta pengurangan tingkat kemiskinan. Evaluasi pada tahun 2017 di Kabupaten Bulungan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti temuan atas penggunaan dana Non RKUD yang tidak disajikan secara wajar, menjadi penting untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan peran penting karena SAKD membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan memiliki standar akuntansi yang jelas, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum. Serta alat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta dalam menilai kualitas laporan keuangan mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah (Suriyanto et al, 2022).

Selain itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu laporan keuangan. Ini mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, sebagai entitas pemerintahan memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai. Khususnya, pegawai yang bertanggung jawab atas urusan keuangan di Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan untuk merancang laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Seharusnya, pemahaman tentang akuntansi adalah dasar yang esensial, karena pengetahuan dan keahlian dalam domain ini menjadi fondasi utama dalam mengelola data akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Jamaluddin et al, 2020).

Beberapa studi telah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Yuliani & Agustini (2016) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif pada kualitas laporan keuangan, sementara faktor lain tidak. Penelitian Indrayani & Widiastuti (2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berdampak signifikan. Kompetensi Sumber Daya Manusia tampaknya mengurangi dampak negatif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal. Nurillah & Muid (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan. Namun, Murapi (2016) menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan, sementara penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdampak positif dan signifikan pada Kualitas Informasi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga menunjukkan inkonsisten hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan agar mendapatkan hasil yang konsisten.

Stewardship Theory

Teori stewardship, menurut Murwaningsari (2009), menekankan korelasi signifikan antara kepuasan dan prestasi organisasi. Teori ini berdasarkan keyakinan filosofis bahwa manusia dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Dalam konteks pemerintahan, Stewardship Theory digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah dan pejabat publik seharusnya mengelola aset dan sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini mendukung penelitian untuk memahami peran pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, mampu memenuhi keinginan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, serta memberikan akuntabilitas ekonomi untuk mencapai tujuan keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Agency Theory

Dalam konteks pemerintahan demokratis, relasi antara pemerintah dan pihak yang memanfaatkan informasi keuangan dapat dijelaskan sebagai relasi agensi (Faristina, 2011). Teori Agensi digunakan untuk memahami hubungan antara agen (biasanya pejabat pemerintah) dan principal (biasanya masyarakat atau pemilih) dalam pelaksanaan kebijakan publik dan penggunaan sumber daya publik. Teori ini fokus pada bagaimana agen memenuhi kepentingan principal dan mengatasi masalah agensi. Dalam konteks pelaporan keuangan daerah, teori agensi dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah daerah mematuhi standar akuntansi sektor publik dan apakah ada faktor yang memengaruhi pemenuhan standar tersebut. Dengan demikian, teori agensi relevan dalam penelitian ini karena pemerintah, sebagai agen, harus memberikan informasi yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sebagai principal.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) melibatkan proses pengumpulan, pencatatan, penggabungan data, dan penyusunan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sistem ini dapat dilakukan manual atau dengan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Tanggung jawab SAKD melibatkan pembuatan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban, manajemen, dan pengendalian, dengan kualitas laporan mencerminkan akurasi, kelengkapan, kepatuhan, dan ketaatan pada pedoman pencatatan. Penerapan sistem akuntansi yang baik diperlukan untuk mencapai karakteristik yang diinginkan dalam laporan keuangan. Kesesuaian dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti, pencatatan kronologis, pengklasifikasian transaksi, dan pelaporan periodik adalah indikator karakteristik sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Permadi (2013), semakin baik penerapan sistem akuntansi, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi adalah aset yang melibatkan semua individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Gomes, 2003). Kompetensi SDM merujuk pada kemampuan individu dalam mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan tanggung jawab. Individu dengan kualitas tinggi mampu mengelola potensi, beradaptasi dengan berbagai situasi, dan memaksimalkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Karakteristik kompetensi SDM diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi: Tingkat pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi, terutama dalam konteks akuntansi pemerintah.
2. SDM berkualitas: Evaluasi kualitas SDM melibatkan pendidikan, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam tugas-tugas akuntansi.
3. Sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian: Ketersediaan jumlah SDM, pemahaman dan pelaksanaan peran serta tanggung jawab dalam pengendalian intern, serta pelatihan keahlian yang sesuai.
4. Sosialisasi peraturan baru: Kemampuan SDM untuk memahami dan menerapkan peraturan baru terkait akuntansi dan pengendalian intern.
5. Pemahaman struktur organisasi: Pemahaman SDM tentang struktur organisasi pemerintah daerah, terutama dalam konteks akuntansi dan pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adalah dokumen berstruktur yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan transaksi suatu entitas pelaporan. Laporan ini mencakup elemen-elemen seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan-catatan, dan laporan lainnya. Kualitas laporan keuangan diukur dengan empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

1. Relevan: Informasi dalam laporan keuangan dianggap relevan jika memberikan manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, disajikan dalam waktu yang tepat, dan lengkap. Relevansi informasi terkait dengan kemampuannya memengaruhi keputusan pengguna.
2. Dapat Diandalkan: Informasi yang dapat diandalkan harus disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Hal ini menjaga informasi bebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan signifikan.

3. Dapat Dibandingkan: Laporan keuangan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan baik secara internal (dengan laporan keuangan sebelumnya) maupun eksternal (dengan laporan keuangan entitas lain). Dalam perbandingan internal, konsistensi kebijakan akuntansi dari tahun ke tahun penting, sementara dalam perbandingan eksternal, entitas harus mengikuti kebijakan serupa.

4. Dapat Dipahami: Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dimengerti oleh para pengguna dan disajikan dengan bahasa dan istilah yang sesuai dengan pemahaman mereka. Pengguna dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dan lingkungan operasional entitas yang melaporkan.

Dengan memenuhi keempat karakteristik ini, laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka atau statistik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 22 SKPD Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan jumlah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian dirarik kesimpulannya (Sujarweni, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bidang akuntansi/ tata usaha keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan jumlah 22 SKPD Kabupaten Bulungan. Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian (Sujarweni, 2015). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 120 responden.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan responden untuk dijawab.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 120 | 22.00 | 32.00 | 28.5667 | 3.08352 |
| Sumber Daya Manusia | 120 | 18.00 | 32.00 | 27.2750 | 3.00689 |
| Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 120 | 31.00 | 44.00 | 38.6917 | 3.68462 |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, nilai meannya adalah 28.5667. Dengan nilai minimum 22.00 dan maximum 32.00 terhadap standar deviasi 3.08352.
2. Sumber Daya Manusia, nilai meannya adalah 27.2750. Dengan nilai minimum 18.00 dan maximum 32.00 terhadap standar deviasi 3.00689.
3. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai meannya adalah 38.6917. Dengan nilai minimum 31.00 dan maximum 44.00 terhadap standar deviasi 3.68462

Uji Validitas

Pengujian ini menggunakan *pearson correlation* dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel.

Berikut ini disajikan hasil uji validitas sebagai berikut:

| Variabel | Indikator | Sig. | Rhitung | Rtabel | Ket |
|----------------------------------|-----------|-------|---------|--------|-------|
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | SAKD1 | 0,000 | 0,198 | 0,179 | Valid |
| | SKAD2 | 0,000 | 0,236 | 0,179 | Valid |
| | SKAD3 | 0,000 | 0,180 | 0,179 | Valid |
| | SKAD4 | 0,000 | 0,194 | 0,179 | Valid |
| | SKAD5 | 0,000 | 0,436 | 0,179 | Valid |
| | SKAD6 | 0,000 | 0,349 | 0,179 | Valid |
| | SKAD7 | 0,000 | 0,547 | 0,179 | Valid |
| | SKAD8 | 0,000 | 0,609 | 0,179 | Valid |

| Variabel | Indikator | Sig. | Rhitung | Rtabel | Ket |
|------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|-------|
| Sumber Daya Manusia | SDM1 | 0,000 | 0,639 | 0,179 | Valid |
| | SDM2 | 0,000 | 0,626 | 0,179 | Valid |
| | SDM3 | 0,000 | 0,703 | 0,179 | Valid |
| | SDM4 | 0,000 | 0,667 | 0,179 | Valid |
| | SDM5 | 0,000 | 0,512 | 0,179 | Valid |
| | SDM6 | 0,000 | 0,588 | 0,179 | Valid |
| | SDM7 | 0,000 | 0,630 | 0,179 | Valid |
| | SDM8 | 0,000 | 0,541 | 0,179 | Valid |
| Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | LKPD1 | 0,000 | 0,670 | 0,179 | Valid |
| | LKPD2 | 0,000 | 0,653 | 0,179 | Valid |
| | LKPD3 | 0,000 | 0,665 | 0,179 | Valid |
| | LKPD4 | 0,000 | 0,602 | 0,179 | Valid |
| | LKPD5 | 0,000 | 0,580 | 0,179 | Valid |
| | LKPD6 | 0,000 | 0,642 | 0,179 | Valid |
| | LKPD7 | 0,000 | 0,645 | 0,179 | Valid |
| | LKPD8 | 0,000 | 0,622 | 0,179 | Valid |
| | LKPD9 | 0,000 | 0,679 | 0,179 | Valid |
| | LKPD10 | 0,000 | 0,629 | 0,179 | Valid |
| | LKPD11 | 0,000 | 0,547 | 0,179 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui besaran koefisien korelasi dari seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian. Nilai R tabel dengan $n = 120$ dan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,179. Dari hasil perhitungan item pertanyaan variabel-variabel penelitian mempunyai nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel artinya seluruh item pertanyaan variabel-variabel sehingga disimpulkan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki *cronbach alpha*. Berikut ini disajikan hasil pengujian reliabilitas.

| Variabel | Nilai Cronbach Alpha | Keterangan |
|---|----------------------|------------|
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 0.825 | Reliabel |
| Sumber Daya Manusia | 0.748 | Reliabel |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 0.848 | Reliabel |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari setiap variabel lebih besar dari 0,60. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut ini adalah tabel hasil uji normalitas sebagai berikut:

| Kolmogrov- Smirnov Z | Asym.Sig | Sig. | Keterangan |
|----------------------|----------|------|------------|
| | 0.200 | 0.05 | Normal |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov test asym sig (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Hal ini berarti data residualnya berdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut dibawah ini adalah hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

| Variabel | Sig. | Keterangan |
|----------------------------------|-------|---------------------------|
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 0.017 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Sumber Daya Manusia | 0.018 | Bebas Heteroskedastisitas |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan teknologi informasi lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan tidanya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Multikolinearitas

Berikut dibawah ini adalah hasil uji multikolineritas sebagai berikut:

| Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|----------------------------------|-----------|-------|------------------------|
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 0.902 | 1.109 | Bebas Multikolineritas |
| Sumber Daya Manusia | 0.902 | 1.109 | Bebas Multikolineritas |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai tolerance dan VIF untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia lebih besar dari 0,10 dan lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolineritas.

Analisis Regresi Berganda

Berikut dibawah ini adalah hasil uji analisis regresi berganda sebagai berikut:

| Variabel Independen | Koefisien Regresi | t hitung | Sig t |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------|
| Konstanta | 8,101 | | |
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 0,044 | -2,431 | 0,017 |
| Sumber Daya Manusia | 0,045 | -2,406 | 0,018 |

Sumber: data primer, diolah

Dari tabel di atas, maka persamaan garis regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut;

1. Nilai konstanta sebesar 8,101 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia) dalam keadaan tetap maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 8,101.

2. Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,044 ini berarti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,044.

3. Koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X2) sebesar 0,045 ini berarti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,045.

Uji t

Berikut dibawah ini adalah hasil uji t sebagai berikut:

| Variabel Independen | Unstandardized Coefficients B | Koefisien Regresi | Sig t |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|
| Konstanta | | 8,101 | |
| Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 2,431 | 0,044 | 0,017 |
| Sumber Daya Manusia | 2,406 | 0,045 | 0,018 |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat djelaskan sebagai berikut:

Hipotesis 1

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,045 dan tingkat signifikan $0,017 < 0,05$.

Hipotesis 2

Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemeruntah daerah. Dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesat 0,045 dengan nilai dan tingkat signifikan sebesar $0,018 < 0,05$.

Uji F

| Probabilitas (signifikan-F) | Keterangan |
|-----------------------------|------------|
| 0,000 | Signifikan |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian tingkat signifikannya $0,00 < a = 0,05$, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Squere |
|-------|-------|----------|-------------------|
| | 0,356 | 0,127 | 0,112 |

Sumber: data primer, diolah

Nilai adjusted R2 sebesar 0,112 atau 11,2% yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia sebesar 11,2%. Sedangkan sisanya 88,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel system akuntansi keuangan daerah sebesar 0,045 dan tingkat signifikan $0,017 < 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Berdasarkan perhitungan dengan nilai koefisien regresi, variable sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesar 0,045 dengan nilai dan tingkat signifikan sebesar $0,018 < 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- _____. 2007. Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Gomes, F. C. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Jamaluddin, Ismaturrahmi, & Yahya, Z. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Volume 4, No 1, 22-25.
- Murapi, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Infestasi*, 12(2), 131–143.
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responbility dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 11(1), 30-41.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–13.

- Permadi, A. D. 2013. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.” *Skripsi. Universitas Widyatama Bandung*.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 14(1), 56–64.